



RENJA **RENCANA KERJA** **TAHUN 2026**

DINAS SOSIAL
PEMERINTAHAN KABUPATEN
KUTAI TIMUR

Jl. Sosial, Kawasan Perkantoran
Bukit Pelangi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Dengan Sosial Kabupaten Kutai Timur merupakan instansi teknis di Kabupaten Kutai Timur yang menyelenggarakan urusan wajib sosial, sebagai upaya mendukung tercapai visi Kabupaten Kutai Timur seperti tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas sosial memiliki peran yang cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan keberfungsian sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan rencana pelaksanaan kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan di bidang Sosial dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat prioritas dan sifatnya mendesak untuk segera diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 mengacu dan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) tahun 2026, dimana pada tahun 2024 terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena berbagai hal. Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur tahun 2026. Semoga Penyusunan Rencana Kerja ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Sosial

Atas tersusunnya Rencana kerja tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur ini, Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas sosial Kabupaten Kutai timur yang turut membantu, dan semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sangatta, 10 April 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Timur

Dr. H. Ernata Hadi Sujito, S.Sos., M.Si
NIP. 19720805 200112 1 007



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur merupakan instansi teknis di kabupaten Kutai Timur yang menyelenggarakan urusan wajib sosial. Sebagai Upaya mendukung tercapainya visi Kabupaten Kutai Timur seperti tertuang dalam RPJMD. Sejalan dengan pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di kabupaten kutai timur terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah kewenangan keberfungsian sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan pemikiran tersebutlah, maka Dinas Sosial kabupaten Kutai Timur menetapkan Rencana Strategis Tahun 2026-2039 yang berisi visi misi, tujuan, sasaran dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan kecenderungan selama kurun waktu lima tahun disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pada tahun 2026. Dengan demikian rencana kerja Dinas Sosial tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas sosial untuk tahun 2026. Untuk mendukung terwujudnya Visi Bupati Kutai Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2030 adalah:

“TERWUJUDNYA KUTAI TIMUR TANGGUH, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan yang meliputi :

1. Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan, Melalui Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi.

2. Transformasi Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasis Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangguh dan Berintegritas.
4. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Digital yang Mendukung Konektivitas Antar Wilayah dan Pemerintah yang Berintegritas.
5. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Terpadu dan Berkesinambungan.

Berdasarkan Susunan Perangkat Organisasi Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Sosial

Dengan demikian Dinas Sosial menjadi salah satu Perangkat Daerah yang terkait dengan misi ke-1 (satu) dalam RPJMD Tahun 2025-2030 yaitu Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan, Melalui Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat, Cerdas serta Berprestasi.

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, Sosial menyusun Renja Dinas Sosial Tahun 2026 berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2025-2030 dan RKPD Tahun 2026 yang akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2026.

2. Landasan Hukum

Adapun peraturan yang digunakan sebagai dasar hukum penyusunan Renja Dinas sosial kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3. 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
4. Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
5. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Permendagri No. 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas sosial tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan Gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan serta indicator kinerja dan pagu indikatif masing – masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas sosial. Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja (RENJA) ini adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan Singkronisasi perencanaan tahunan Dinas sosial berdasarkan dokumen RENSTRA;
Menjadikan renja sebagai dokumen perencanaan efektif, efisien dan
2. akuntabel dalam kurun waktu satu tahun;

- Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas sosial
3. Menyediakan informasi tentang indicator kinerja Dinas sosial yang akan
 4. diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2026
4. Sistematika Penulisan
- Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial tahun 2026 disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :
- Bab I Pendahuluan
1. Latar Belakang
 2. Landasan Hukum
 3. Maksud dan Tujuan
 4. Sistematika Penulisan
- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu
1. Analisis Kinerja Output
 2. Analisis Kinerja Keuangan
 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 4. Reviu terhadap Rancangan Awal
 5. Penelaah Usulan program dan kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan, Sasaran dan Program kegiatan
1. Tujuan
 2. Sasaran
 3. Program kegiatan
- Bab IV Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat daerah
- Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DQERAH DAN CAPAIN RENSTRA TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2024

1. Analisis Kinerja Output

Pada tahun 2024 Dinas sosial merencanakan melaksanakan 6 (enam) program yang tersebar 16 (enam belas) kegiatan dengan 76 sub kegiatan. Analisis kinerja akan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat spesifik yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi SKPD, karena program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan Masyarakat pemerlu pelayanan sosial. Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur pada Tahun 2024 yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 31.374.177.364 ,- dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar 76,14% dan capain realisasi keuangan sebesar Rp. 23.659.937.608 (75.41%.) silva Rp. 7.714.239.756 Implikasi yang timbul terhadap Capaian Kinerja Program Resntra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur adalah Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 85,71 % dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya sebesar 100 %

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung seberapa besar fungsi yang dilaksanakan suatu SKPD.

Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan realisasi tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan. Optimisme terhadap ketersediaan anggaran menyebabkan SKPD meningkatkan jumlah target sasaran yang ingin dicapai.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 adalah factor sumberdaya manusia. Dinas sosial merupakan Dinas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditingkat Kabupaten. Tugas utama tersebut dilaksanakan dalam bentuk perubahan perilaku Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau sekarang disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dapat berfungsi sosial secara optimal maka diberi bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi, dengan tujuan untuk mempertahankan keberfungsian sosialnya.

Untuk dapat melakukan proses perubahan perilaku dari disfungsi sosial menjadi berfungsi sosial secara optimal diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dibidang ilmu kesejahteraan sosial atau profesi pekerjaan sosial. Dari 74 orang PNS Dinas Sosial hanya 5 orang yang berlatar belakang Pendidikan ilmu kesejahteraan sosial, sedangkan yang lainnya berasal dari berbagai disiplin ilmu. Hal yang menyebabkan proses perubahan perilaku belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dan pemberian bantuan modal UEP/KUBE masih harus tetap dilaksanakan sehingga Masyarakat lebih mengenal Dinas Sosial, sebagai instansi memberi bantuan sosial.

Kurangnya sinergi antara program yang dibiayai dengan APBD dengan program – program corporate social responsibility (CRS) menjadi salah satu factor yang juga turut berpengaruh. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi CSR yang cukup besar. Jika potensi dikelola dengan baik dan diarahkan untuk program – program rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan bantuan sosial, maka kemungkinan untuk menekan angka kemiskinan sampai pada titik paling rendah akan dapat terwujud.

Berdasarkan analisis indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial kabupaten Kutai Timur, maka factor kunci yang mendukung keberhasilan adalah :

1. Peningkatan mutu dan jumlah sumber daya manusia (aparatur dan potensi sumber kesejahteraan sosial),
2. Peningkatan sinergitas antara Dinas Sosial kabupaten Kutai Timur dengan unit kerja penganggaran
3. Peningkatan kepedulian Masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait,
4. Pemanfaatan PSKS menjadi penting, karena PSKS adalah ujung tombak Dinas sosial mulai dari level terbawah
5. Pemanfaatan Data penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) secara optimal
6. Perbaikan data DTKS melalui verifikasi dan pengelolaan
7. komitmen pimpinan serta jajarannya dalam penanganan PMKS
8. Dan Tersedianya fasilitas di Rumah Pelayanan Sosial (RPS) dan SDM baik psikolog maupun perawat

2. Analisis Kinerja Keuangan

Dinas sosial Kabupaten Kutai Timur sebagai instansi yang melaksanakan kegiatan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara keseluruhan telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA 2024 dengan jumlah anggaran senilai Rp.31.374.177.364,- dengan nilai belanja langsung sebesar Rp. 21.677.778.216,- dan belanja tidak langsung sebesar yang diarahkan 6 program dan 16 kegiatan secara umum target dan realisasi anggaran dapat dilihat pada table 2 berikut ini :

TABLE 2.1

Capaian Kinerja Program dan kerangka Pendanaan															
No	Bidang Urusan Pemerintah & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus	Perencanaan Pencapaian							Kondisi Akhir	Pelaksanaan Pada DPA			
				Target								Capaian			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021		2022	2023	2024	
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
1	2	3	4												
1	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	Jumlah PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan $\frac{\text{Jumlah PMKS yang ada}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100 \%$	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84	69.84	60.50	71.73	64.28	62.85
2	Program Penanganan Warga Negara Migran	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapat Penanganan	$\frac{\text{Jumlah Negara Migran yang melaporkan}}{\text{Jumlah warga negara migran yang ada}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	71.73	20.00	100
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	$\frac{\text{Jumlah Jenis PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Jenis PMKS yang ada}} \times 100 \%$	34.41	34.41	100	100	100	100	100	34.02	32.30	30.11	100	85.71
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial	$\frac{\text{Jumlah Jenis PMKS yg mendapatkan perlindungan}}{\text{Jumlah seluruh Jenis PMKS yang seharusnya mendapatkan perlindungan sosial}} \times 100 \%$	66.51	100	100	100	100	100	100	100	100	66.79	90.87	100
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah korban bencana}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial}} \times 100 \%$	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.69	100	100

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur melaksanakan fungsi penunjang daerah di bidang Sosial serta tugas pembantuan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan **Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial** Berdasarkan hasil Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial pada Tahun 2024 untuk Capaian Persentase Kinerja sebesar 75,75% dan Capaian Persentase Keuangan sebesar 75,42% yang disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

TABLE 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat
Tahun 2024

Kode	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerj a	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)	Predikat
1.06.0.00.0.00. 01.000	Dinas Sosial					68,34	S	31.374.177. 364,00	23.659.937.62 6,00	75,41	S
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	%	76,29	70,29	92,14	ST	18.973.239. 399,00	15.715.043.05 5,00	82,83	T
1.06.01.2.01	Perencanaan , Penganggaran n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokume n	8,00	8,00	100	ST	1.114.230.0 00,00	1.035.463.400, 00	92,93	ST
1.06.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	3,00	3,00	100	ST	574.114.000 ,00	561.779.137,0 0	97,85	ST
1.06.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokume n	1,00	1,00	100	ST	100.000.000 ,00	82.414.128,00	82,41	T

	Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	6.514.000,00	6.201.590,00	95,20	ST
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	50.000.000,00	46.882.218,00	93,76	ST
1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	65.782.000,00	52.600.275,00	79,96	T
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	ST	247.820.000,00	242.998.465,00	98,05	ST

1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1,00	1,00	100	ST	70.000.000,00	42.587.587,00	60,84	R
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan keuangan perangkat daerah	%	100,00	100,00	100	ST	11.591.526.999,00	9.514.314.786,00	82,08	T
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	38,00	35,00	92,11	ST	9.336.052.407,00	7.390.302.769,00	79,16	T
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	44,00	35,00	79,55	T	1.310.624.957,00	1.194.918.420,00	91,17	ST
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	12,00	100	ST	694.849.635,00	684.296.453,00	98,48	ST
1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	100.000.000,00	99.268.000,00	99,27	ST
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	2,00	2,00	100	ST	50.000.000,00	48.920.733,00	97,84	ST

	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	18,00	18,00	100	ST	50.000.000,00	49.343.011,00	98,69 ST
1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	50.000.000,00	47.265.400,00	94,53 ST
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian	%	100,00	0,00	0	SR	1.705.744.000,00	1.604.891.781,00	94,09 ST
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	160,00	150,00	93,75	ST	600.000.000,00	532.681.670,00	88,78 T

1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	59,00	50,00	84,75	T	1.105.744.00,00	1.072.210.111,00	96,97	ST
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	78,00	78	T	2.104.033.400,00	1.623.128.460,00	77,14	T
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	SR	937.220.400,00	716.268.700,00	76,42	T
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	6,00	100	ST	400.000.000,00	346.487.000,00	86,62	T
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	70.000.000,00	63.584.600,00	90,84	T
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60,00	50,00	83,33	T	696.813.000,00	496.788.160,00	71,29	S
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	1,00	0,00	0	SR	0,00	0,00	0,00	SR

	Umum Kantor	Kantor yang Disediakan									
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang dilakukan pemeliharaan	Unit	78,00	77,00	98,72	ST	1.641.073.00,00	1.251.234.743,00	76,24	T
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	26,00	25,00	96,15	ST	397.328.000,00	341.779.821,00	86,02	T
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50,00	50,00	100	ST	112.000.000,00	102.132.800,00	91,19	ST
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	100	ST	1.031.745.000,00	807.322.122,00	78,25	T
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	Unit	1,00	0,00	0	SR	100.000.000,00		0,00	SR

	i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase Panti Sosial dan Lembaga pelatihan yang menerima program pemberdayaan sosial baik melalui kelompok maupun perorangan	%	69,84	0,00	0	SR	3.780.926.965,00	2.560.283.851,00	67,72	S	
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Keluarga KAT yang diberi Fasilitas dan Meningkatkan Kapasitasnya	Keluarga	50,00	46,00	92	ST	450.000.000,00	348.204.950,00	77,38	T	
1.06.02.2.01.0001	Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	72,00	46,00	63,89	R	300.000.000,00	218.257.000,00	72,75	S	
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50,00	35,00	70	S	150.000.000,00	129.947.950,00	86,63	T	

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja Sosial dan lembaga yang di tingkatkan kemampuannya	Orang	505,00	0,00	0	SR	3.330.926,965,00	2.212.078.901,00	66,41	S
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160,00	58,00	36,25	SR	1.130.926,965,00	371.643.700,00	32,86	SR
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	18,00	18,00	100	ST	650.000.000,00	586.005.200,00	90,15	T
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50,00	100,00	200	ST	650.000.000,00	548.924.265,00	84,45	T

1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	%	100,00	0,00	0	SR	3.807.500.000,00	1.682.286.655,00	44,18	SR
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyanggung Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	Orang	670,00	0,00	0	SR	2.150.000.000,00	1.027.166.912,00	47,78	SR
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	117,00	117	ST	500.000.000,00	247.420.997,00	49,48	SR
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	65,00	65	R	150.000.000,00	57.048.000,00	38,03	SR

1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25,00	0,00	0	SR	250.000.000,00	84.783.961,00	33,91	SR
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	55,00	55	R	200.000.000,00	110.135.388,00	55,07	R
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	116,00	116	ST	200.000.000,00	97.935.300,00	48,97	SR
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	116,00	116	ST	150.000.000,00	100.610.180,00	67,07	S

	dan Masyarakat											
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50,00	52,00	104	ST	100.000.000,00	21.650.000,00	21,65	SR	
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30,00	6,00	20	SR	100.000.000,00	23.130.000,00	23,13	SR	
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	85,00	85	T	100.000.000,00	97.898.000,00	97,90	ST	
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	50,00	124,00	248	ST	100.000.000,00	11.445.000,00	11,45	SR	

		Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota										
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40,00	124,00	310	ST	150.000.000,00	107.564.000,00	71,71	S	
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20,00	41,00	205	ST	150.000.000,00	67.546.086,00	45,03	SR	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Orang	328,00	0,00	0	SR	1.657.500.000,00	655.119.743,00	39,52	SR	
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	100,00	26,00	26	SR	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	ST	

		Kewenangan Kabupaten/Kota										
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	44,00	44	SR	50.000.000,00	9.330.000,00	18,66	SR	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	44,00	44	SR	100.000.000,00	28.885.000,00	28,89	SR	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	1,00	1	SR	80.000.000,00	46.945.600,00	58,68	R	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	28,00	0,00	0	SR	150.000.000,00	68.932.100,00	45,95	SR	

1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20,00	5,00	25	SR	80.000.000,00	32.169.600,00	40,21	SR
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	38,00	38	SR	100.000.000,00	81.275.500,00	81,28	T
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota	Orang	100,00	76,00	76	T	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	ST

1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75,00	2,00	2,67	SR	40.000.000,00	3.150.000,00	7,88	SR
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	2,00	2	SR	100.000.000,00	33.138.500,00	33,14	SR
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50,00	45,00	90	T	180.000.000,00	123.921.343,00	68,85	S
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan	Orang	30,00	1,00	3,33	SR	175.000.000,00	33.903.500,00	19,37	SR

	Reunifikasi Keluarga	Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota									
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50,00	8,00	16	SR	52.500.000,00	40.357.600,00	76,87	T
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	1,00	25	SR	400.000.000,00	3.211.000,00	0,80	SR
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100,00	0,00	0	SR	1.812.511.000,00	1.444.095.339,00	79,67	T
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak anak terlantar yang mendapat perlindungan dan pemeliharaan	Orang	100,00	0,00	0	SR	300.000.000,00	278.815.431,00	92,94	ST
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20,00	20,00	100	ST	100.000.000,00	85.746.400,00	85,75	T

1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20,00	20,00	100	ST	100.000.000,00	96.389.531,00	96,39	ST
1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20,00	20,00	100	ST	100.000.000,00	96.679.500,00	96,68	ST
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data fakir miskin yang terkelola mendapat bantuan sosial	Orang	13.479,00	0,00	0	SR	1.512.511.000,00	1.165.279.908,00	77,04	T
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	121.198,00	11.500,00	9,49	SR	650.000.000,00	470.765.715,00	72,43	S
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	13.000,00	164,00	1,26	SR	200.000.000,00	186.168.400,00	93,08	ST

1.06.05.2.02.0003	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	160,00	0,00	0	SR	510.436.000,00	465.650.307,00	91,23	ST
1.06.05.2.02.0004	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0,00	0,00	0	SR	152.075.000,00	42.695.486,00	28,08	SR
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100,00	0,00	0	SR	2.850.000,00	2.204.344,726,00	77,35	T
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan perlindungan sosial	Orang	1.000,00	0,00	0	SR	2.329.939,00	1.758.012.358,00	75,45	S
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap	Orang	1.000,00	1.000,00	100	ST	1.527.899,00	1.034.462.160,00	67,70	S

		Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota									
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500,00	609,00	121,8	ST	300.000.000 ,00	294.572.500,0 0	98,19	ST
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampung an Pengungs an	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	20,00	20,00	100	ST	152.040.000 ,00	102.908.000,0 0	67,68	S
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	100,00	100	ST	200.000.000 ,00	183.876.798,0 0	91,94	ST
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	100,00	100	ST	150.000.000 ,00	142.192.900,0 0	94,80	ST

1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana	%	100,00	0,00	0	SR	520.061.000,00	446.332.368,00	85,82	T
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	2,00	2,00	100	ST	100.000.000,00	81.412.468,00	81,41	T
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	66,00	65,00	98,48	ST	420.061.000,00	364.919.900,00	86,87	T

Permasalahan

Dari berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur, tidak terlepas dari tugas dan fungsi sebagai Instansi Pemerintah yang berkewajiban untuk melayani masyarakat terutama dibidang kepemudaan dan keolahragaan, selain itu program dan kegiatan tersebut merupakan dukungan terhadap salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

1.3 Penyelenggaraan Tugas pokok dan kedudukan Perangkat Daerah dan Isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial pada Bab II Kedudukan pasal 2 yaitu :

- (1) Dinsos merupakan unsur Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinsos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dinas Sosial mempunyai susunan Organisasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinsos; b.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Kepegawaian;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk mendukung 50 Program Unggulan Bupati Kutai Timur Tahun 2026-2029 intervensi terhadap program tersebut berada di bidang Penanganan Fakir Miskin dan Bidang rehabilitasi ada 4 program unggulan yang diamanatkan kepada Dinas Sosial yaitu Pendataan Fakir Miskin dan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial untuk kebutuhan :

1. Rumah Layak Huni (RLH) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah & Relokasi Warga Terdampak Longsor yang akan dilaksanakan oleh Dinas
2. Beasiswa Kutim Stimulan & Beasiswa Kutim Tuntas
3. Jaminan BPJS Kesehatan bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu
4. Pemberdayaan, Konsultasi & Perlindungan Hukum bagi Anak, Perempuan, & Keluarga di Setiap Kecamatan

1.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan. Pada saat forum OPD ada beberapa usulan usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kutai timur selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Adapun hasil usulan-usulan dari Masyarakat disajikan dalam tabel 2.4:

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2024, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan nggarannya telah sesuai dengan kebutuhan

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kutai timur dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang sosial, Dinas Sosial secara proaktif berperan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas; pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin; pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

3.2. Program dan kegiatan

Tujuan dan sasaran dari penyusunan rencana kerja Dinas sosial Tahun 2026

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB
UPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Amnalysis Prognoses Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

-

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

2.1 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

- Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
- Fasilitas pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan

2.2 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/kota

- Koordinasi dan Singkronisasi penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang

2.3 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/kota

- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan Masyarakat kewenangan kabupaten/kota
- Pengenalan, penanaman dan penghayatan Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiaan dan restorasi sosial
- Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan kabupaten/kota

2.4 Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial

- Pendataan, verifikasi dan validasi sertifikasi sumber daya kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

3.1 Pemulangan Warga negara Migran Korban tindak kekerasan dari Titik debarkas di daerah kabupaten /kota untuk dipulangkan ke Desa /kelurahan asal

- Fasilitas pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan Dalam dan Luar Negeri dan Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten / kota

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

4.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandang Pengemis di Luar Panti Sosial

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga

- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantarserta gelandang pengemis dan Masyarakat
- Pemberian akses kelayanan Pendidikan dan Kesehatan dasar
- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Pemberian Layanan Kedaruratan
- Pemberian Pelayanan penelusuran keluarga
- Pemberian layanan Rujukan
- Fasilitas pemberdayaan dan pelatihan vokasional bagi kemandirian ekonomi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandang dan pengemis
- Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum(ABH)
- Penyediaan perbekalan Kesehatan
- Pelaksanaan Rehabilitasi sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial

4.2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti Sosial

- Pemberian layanan data dan Pengaduan
- Pemberian layanan Kedaruratan
- Pemberian Permukiman
- Penyediaan Sandang
- Penyediaan Alat Bantu
- Penyediaan perbekalan Kesehatan diluar panti
- Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial
- Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akte kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak
- Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
- Pemberian pelayanan Reunifikasi keluarga
- Pemberian layanan rujukan

- Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi sosial Kabupaten/kota
- Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Pengembangan dan kampanye Sosial peduli anak, lanjut usia dan disabilitas serta Pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya
- Fasilitas pemberdayaan dan pelatihan vokasional bagi kemandirian ekonomi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5.1 Pemeliharaan anak – anak terlantar

- Penjangkauan anak – anak terlantar
- Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar
- Fasilitas proses pengangkatan anak untuk diusulkan kepada provinsi

5.2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah Kabupaten

- Pendataan Fakir miskin Cakupan Daerah kabupaten / kota
- Fasilitas bantuan pengembangan Ekonomi Masyarakat
- Fasilitas bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / kota

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

6.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial Kab/ kota

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan Sandang
- Penanganan khusus bagi kelompok rentan
- Pelayanan Dukungan Psikososial
- Penyediaan Tempat penampungan pengungsi

6.2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap

Kesiapsiagaan bencana kab/kota

- Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
- Peningkatan kapasitas relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
- Sosialisasi Edukasi penanggulangan bencana pada anak usia sekolah
- Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada Masyarakat
- Penyediaan tempat penampungan pengungsian
- Koordinasi Sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dijabarkan dalam Tabel 3.2.

MUSRENBANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KAB. KUTAI TIMUR
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN BERTAHAP OPD	REVISI HASIL TAPAKS BERTAHAP OPD TAHUN 2024	PEMERIKSAAN CAPAIAN TAPAKS BERTAHAP OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENCAHAYAN					NEL OMBUD KESADARAN	PENGALAMAN BAKU RENCANA TAHUN 2027		PIL BANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAOU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DATA	PROSEDUR NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAOU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS SOSIAL						0,00							42.817.726.179,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WALAYAT BUKHARA KUTAI TIMUR						0,00							42.817.726.179,00	
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						0,00							42.817.726.179,00	
1.06.01		PROGRAM PEMULJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KOTA						0,00							22.020.000.000,00	
1.06.01.2.01		Pemerataan, Kemitraan dan Grahak Kemitraan Persegi Daerah						0,00							270.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0001		Pengawasan Dokumen Perencanaan Persegi Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Persegi Daerah				3 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Timur, Kutai Negeri, Kutai Berau, Kutai Linggajaya	PENGALAMAN BERTAHAP		7. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat			180.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEKAWALAN SUB KEKAWALAN	INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEKAWALAN	TARGET KANTOR RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET TAHUN 2024	PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2025	TARGET 2025	CAPAIAN KANTOR DAN KEMERCAK PENCAPAIAN				KELOMPOK SARJAN	PENCAPAIAN KANTOR TAHUN 2022		PENCAPAIAN KANTOR PENCAPAIAN KANTOR	
								PAU INDIKATOR IRI	LOKASI	SARJAN DAN	NASIONAL		PROGNO DAIRAH	TARGET		PAU INDIKATOR IRI
1	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
2	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
3	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
4	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
5	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
6	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
7	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
8	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
9	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
10	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
11	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
12	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
13	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
14	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
15	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
16	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
17	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
18	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
19	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
20	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
21	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
22	05-1-2-38	Pencapaian Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan Kantor Peningkatkan	4	5	6	7	8	5	10	1	12	13	14	15	16	17
23	05-1-2-38	Pencapaian Kantor P														

Ranwal Renja Dinsos 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URAIAN RENCANA URAIAN RENCANA URAIAN RENCANA URAIAN RENCANA	INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR PROGRAM	TARUHI PERIODE PERIODE PERIODE	REKASASI REKASASI REKASASI REKASASI	PRAKARAK CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN	PACU INDIKATIF (R)	LOKAS	SUMBER DATA	PRIORITY PRIORITY PRIORITY PRIORITY	WELBORN WELBORN WELBORN WELBORN	PRAKARAK CAPAIAN CAPAIAN CAPAIAN	REKASASI REKASASI REKASASI REKASASI
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													

[illegible]

NO	KODE	URAIAN BIDANG URAIAN PROGRAM REKAM SUB REKAM	INDUKSI PROGRAM REKAM SUB REKAM	TARGET REKAM RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN TAMBAH OPD TAHUN 2024	PELAYANAN CAPAIAN TAMBAH OPD TAHUN 2025	TARGET 2025	CAPAIAN KEMAJUAN DAN KEMAJUAN PENYAKIT	LOKASI	SUMBER DATA	PROGNOSTIK DALAM	KELUPOK SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PELAYANAN KEMAJUAN PENYAKIT DALAM REKAM SUB REKAM
1	1	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	3	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	4	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	5	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	6	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	9	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	10	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	11	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	12	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	13	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	14	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	15	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	16	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	17	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	18	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	19	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	20	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	21	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	22	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	23	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	24	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	25	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	26	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	27	Induksi Program Rekam Sub Rekam	Induksi Program Rekam Sub Rekam	5	6	7	8	9	10	11	12			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANJUK PERIODIK RENJA OPD	REKAPITULASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		PRAKTIKALISASI TARGET RENJA OPD 2024		CAPAIAN & NERACA DAN KERANGKA PEMODALAN			PRAKTIKALISASI BENCANA		KELOMPOK SASARAN	PRAKTIKALISASI BENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB
					6	7	TARGET 2024	PACU INDIKATIF (R)	LOKASI	SUBKATEGORI	PRIORITAS NASIONAL	TARGET	PACU INDIKATIF (R)		4	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		05.25.2.02.022	Program Dasa Fari'ah - Cakupan Jember Kabupaten	Program Dasa Fari'ah - Cakupan Jember Kabupaten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REKAPITULASI BENCANA	12	13	14	15	16	17	
		101.96	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Program Penanganan Bencana yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan organisasi masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REKAPITULASI BENCANA	12	13	14	15	16	17	
		05.26.2.01	Program Sosial Keadilan Berbasis Masyarakat Sosial Keadilan Berbasis Masyarakat	Program Sosial Keadilan Berbasis Masyarakat Sosial Keadilan Berbasis Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REKAPITULASI BENCANA	12	13	14	15	16	17	
		101.96.2.01.001	Program Sosial Keadilan Berbasis Masyarakat Sosial Keadilan Berbasis Masyarakat	Program Sosial Keadilan Berbasis Masyarakat Sosial Keadilan Berbasis Masyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	REKAPITULASI BENCANA	12	13	14	15	16	17	

NO	KODE	URUSAN BUDJET / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET ANCIER PERIODE RENCANA OPD	KELOMPOK KEGIATAN RENCANA TAHUN 2024	PRAKARAKAN TARGET RENCANA OPD 2024	TARGET 2024	CAPAIAN KEGIATAN RENCANA PENCAPAIAN				PROFESIONALITAS	KELOMPOK KEGIATAN	PRAKARAKAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2027		PRAKARAKAN KEGIATAN RENCANA TAHUN 2027
								PAU INDIKATOR (Rp)	LOKAS	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAU INDIKATOR (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
06.06.2.1.001	001	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi
06.06.2.1.002	002	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi
06.06.2.1.003	003	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi	Pengembangan Sistem Informasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun berdasarkan uraian Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikas, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagai berikut:

4.2 Prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas Kab Kutai Timur Tahun 2026

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2026 disusun dalam rangka mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selengkapnya keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan program Kabupaten Kutai timur Tahun 2026 secara detail tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Program Kegiatan yang Mendukung Prioritas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026

NO	PROGRAM UNGGULAN	PERMASALAHAN	SATUAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	NOMENKLATUR KEMENDAGRI NO 900.1.15.5.3406 Tahun 2026		
			2026	2026		PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Rumah Layak Huni (RLH) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Belum tersediannya data BNBA untuk desil 1-2	1000 Kk	3125 usulan	50,000,000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	Jamian BPJS Kesehatan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kurang Mampu	Belum tersediannya data BNBA untuk desil 1-5	12 jiwa					
	Beasiswa Kutim Stimulan & Beasiswa Kutim Tuntas	Belum tersediannya data BNBA untuk desil 1-5	1000 orang					

Dinas Sosial hanya mendukung untuk menyediakan data BNBA untuk kebutuhan Rumah tidak layak huni, BPJS Kesehatan bagi seluruh lapisan Masyarakat kurang mampu dan beasiswa kutim stimulant dan beasiswa kutim tuntas, sedangkan pelaksanaan program tersebut berada dimasing – masing OPD yang melaksanakan sesuai Tusi OPD tersebut

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur



Sangatta, 10 April 2025
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Timur,


Dr. H. Ernata Hadi Sujito, S.Sos., M.Sii